



Abstraksi

Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta merupakan sebuah model praktek kolaborasi antara Pemerintah Kota Surakarta dengan berbagai aktor lintas sektor yang memiliki tujuan di dalam pembuatan kebijakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah tertuang pada Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. TAD terbentuk pada tahun 2010 dan diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo. Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembentukan paradigma baru tentang penyandang disabilitas, PPRBM melakukan proses advokasi yang berujung pada pembentukan Tim Advokasi Difabel (TAD) dengan mengikutsertakan unsur-unsur perangkat Pemerintahan Daerah yang terdiri dari unsur-unsur teknis kedinasan dengan berbagai organisasi lain yang memiliki kepentingan terhadap penyandang disabilitas.

Tesis ini berusaha menjawab berbagai pertanyaan mengenai: (1) latar belakang faktor pelaksanaan praktek kolaboratif antara Pemerintah Kota Surakarta dengan aktor non negara; (2) faktor pendukung dan penghalang internal TAD, (3) faktor pendukung dan penghalang eksternal TAD. Tesis ini berjenis studi kasus, dengan metode pengambilan data berupa wawancara dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pola *Purposive Sampling*.

Bedasarkan penelitian di lapangan menemukan bahwa, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek kolaboratif pada TAD Kota Surakarta antara lain adalah adanya: (1) Sejarah pendekatan informal pemerintah kota Surakarta di dalam pengambilan keputusan, (2) perwujudan Perda Kota Surakarta No. 02 Tahun 2008, dan (3) kerjasama PPRBM dengan lembaga donor asing. Adapun faktor yang mendukung praktek kolaborasi secara internal adalah: (1) pembiayaan aktor non negara, (2) keterbukaan Pemerintah Kota Surakarta, dan Legitimasi hukum. Faktor penghalang internal terdiri dari: (1) realisasi program oleh OPD tidak sesuai dengan perencanaan TAD, (2) paradigma penyelenggara negara yang bersifat "*charity minded*". Sedangkan, faktor yang mendukung secara eksternal adalah adanya dukungan kerjasama lembaga asing dengan PPRBM dalam perwujudan kebijakan pro-difabel. Sedangkan faktor penghalang eksternal antara lainnya adalah: (1) sarana dan prasarana sektor privat yang tidak menunjang penyandang disabilitas, (2) penyandang disabilitas yang tidak kooperatif.

Kata Kunci : Kolaborasi, Tim Advokasi Difabel